



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,  
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Perpustakaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 Juni 2016.
Pukul	: 15.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, BSc./Kasubag. Rapat Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pembahasan RKP dan RKA-KL TA 2017.</b>
Hadir	: 37 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Kepala Perpustakaan beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.00 oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan RI terhadap pemaparan dan penjelasan yang komprehensif mulai dari fungsi perpustakaan, kerangka berfikir, sasaran strategi, target pencapaian, layanan perpustakaan berbasis digital/TIK, ekosistem digital, akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet, diversifikasi layanan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka, dan pustakawan.
2. Berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2016 dan Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016, Perpustakaan RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2017 sebesar Rp563.872.400.000,- (*lima ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) yang didalamnya terdapat anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp390.116.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh miliar seratus enam belas juta rupiah*).

3. Dalam rangka peningkatan literasi, memenuhi layanan perpustakaan berbasis digital/TIK, ekosistem digital, akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet, diversifikasi layanan perpustakaan, program pengembangan bahan pustaka, dan penambahan jumlah pustakawan, Perpustakaan RI mengajukan usul anggaran pada RAPBN TA 2017 sebesar **Rp1.874.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar rupiah)** sehingga memerlukan tambahan anggaran sebesar **Rp1.310.127.600.000,- (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)**.
4. Terhadap usul pagu indikatif RAPBN TA 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan usul tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), Komisi X DPR RI memberikan pandangan sbb:
  - a. Belum menyetujui pagu indikatif maupun alokasi anggaran di masing-masing deputi dan program, karena memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kepala Perpustakaan RI meyakinkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, bahwa Perpustakaan RI memerlukan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2017.
  - b. Meminta Perpustakaan RI untuk menghitung besaran pagu dan menyampaikan rasionalitas usul tambahan anggaran sebesar **Rp1,310 T** di masing-masing deputi dan program/kegiatan yang disampaikan kepada Komisi X DPR RI sebelum tanggal 29 Juni 2016.
  - c. Beberapa program dan/atau kegiatan yang perlu ditingkatkan antara lain: kemampuan literasi, minat baca masyarakat, pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan, kualitas dan kuantitas pustakawan, ekosistem digital dan pendukungnya, akses baca bagi masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet, penguatan perpustakaan desa dan komunitas, cakupan sosialisasi diperluas, sinergitas dengan K/L dan Pemerintah Daerah.
  - d. Meminta Perpustakaan RI agar membuat perbandingan (komparasi) program dan/atau kegiatan, anggaran-kinerja tahun 2015 dan tahun 2016, dan Renstra, serta target kinerja di masing-masing program sebagai referensi pembuatan RKP dan RKA-K/L TA 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Meminta Perpustakaan RI untuk mengevaluasi Renstra dengan mendiskusikan bersama para pemangku kepentingan dan memfokuskan kembali (*refocusing*) program/kegiatan prioritas dengan memperhatikan data dan kondisi saat ini, serta menghadapi tantangan dan peluang Perpustakaan di masa mendatang
5. Komisi X DPR RI dan Kepala Perpustakaan RI sepakat akan mengadakan RDP kembali antara tgl. 20 s/d 21 Juli 2016 dengan agenda pendalaman penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), dan penetapan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

KEPALA PERPUSNAS RI,  
  
MUHAMMAD SYARIF BANDO

KETUA RAPAT,  
  
IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M